

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Semenjak terjadinya krisis ekonomi pada pertengahan tahun 1997 lalu, berbagai tuntutan reformasi yang digerakkan oleh mahasiswa menghentakkan atmosfer kehidupan nasional. Meskipun bermula dari krisis ekonomi, bola tuntutan reformasi itu bergulir deras ke bidang politik. Soehartopun dengan berat hati melepaskan jabatan presiden yang sudah dinikmatinya selama 32 tahun. Selama 32 tahun itulah pembangunan ekonomi dibangun di atas praktek kejahatan-kejahatan politik dan nafsu pribadinya.

Aksi-aksi kampus (mahasiswa dan dosen) bermula dari rasa keprihatinan moral yang sangat mendalam atas berbagai krisis yang terjadi di republik ini. Sebagai intelektual, yang peduli dengan nasib bangsanya, mereka melakukan gerakan aksi memprotes penguasa (pemerintah Orde Baru) untuk segera menyelesaikan krisis dan membawa bangsa ini keluar dari kemelut yang berkepanjangan yang mengakibatkan kesengsaraan rakyat.

Persoalan-persoalan yang menggugah keprihatinan mahasiswa ini merupakan mata rantai yang terlupakan dalam pengelolaan kebijaksanaan dan kegiatan politik. Politik sebagai seni mengatur dan mengurus negara yang mencakup aneka macam kebijakan dan kegiatan dalam suatu sistem masyarakat yang terorganisasi sistem sosial sebagaimana tergariskan dalam

UUD 1945.<sup>1</sup> Nampaknya fenomena gerakan mahasiswa ini tidak jauh berbeda dengan Angkatan' 66 yang dulu juga kritis terhadap penguasa. Berbagai pihak, baik dalam kampus maupun di luar kampus, telah bersimpati dan mendukung aksi-aksi tersebut.

Para mahasiswa dengan tanggung jawab sosialnya menyuarakan jeritan rakyat yang terhimpit ketidakpastian dan kekuasaan yang represif. Berbagai bukti baik di masa kolonial, tahun 1960-an, 1970-an, dan 1998 menunjukkan bahwa mahasiswa tetap "*leading*" menyuarakan reformasi. Mahasiswa juga menjadi pemicu perlawanan terhadap aktor-aktor politik yang menghambat reformasi. Jatuhnya korban di pihak mahasiswa dimana-mana. Menyatunya gerakan mahasiswa dengan masyarakat akan meluapkan emosi massal terhadap simbol-simbol kekerasan yang telah banyak menindas rakyat.<sup>2</sup>

Kebijakan menempati mahasiswa di lapangan hanya akan memperkuat budaya perlawanan kekerasan (*counter – cultural of violence*). Terbukti, peristiwa penembakan empat mahasiswa Universitas Trisakti 12 Mei 1998 menimbulkan perlawanan mahasiswa yang semakin membara hingga timbulnya letupan pembakaran, penjarahan, dan kerusuhan yang dilakukan oleh sebagian rakyat yang tidak bertanggung jawab.<sup>3</sup>

Panorama aksi keprihatinan mahasiswa, walaupun memakan korban, terpicu oleh realisasi sosial politik yang kurang kondusif bagi kebudayaan

---

<sup>1</sup> Pieter Sanga Lewar "Reformasi sebagai Patron Demokrasi", *Kedaulatan Rakyat*, 27 Mei 1998

<sup>2</sup> Erlangga Masdiana, "Gerakan Reformasi Tanpa Kekerasan, sebuah Utopia" *Republika*, 27 Mei 1998

<sup>3</sup> Erlangga Masdiana, *Ibid*

sistem demokrasi. Intervensi kekuasaan masih terlalu kuat sehingga melemahkan dan bahkan membunuh aspirasi rakyat.<sup>4</sup>

Reformasi telah menjadi simbol “revolusi” pada masa Soekarno yang telah demikian menghanyutkan rakyat hingga lupa pada realitas kehidupannya. Reformasi juga berawal dari terakumulasinya serangkaian krisis yang dengan begitu bebalnya diabaikan oleh penguasa-penguasa Orde Baru. Kritik-kritik telah tidak mempan lagi menembus membran kekuasaan. Kekuasaan bagaikan gunung es yang beku dan dingin serta menolak semua ide-ide hangat yang mulai menjadi bara bagi sebuah pergerakan.<sup>5</sup> Kebijakan stabilitas yang kaku dikritik sebab menghalangi perubahan alami, sehingga dinamika kehidupan sosial ekonomi masyarakat tidak mengimbas terhadap kehidupan politik. Sebagian para pengkritik menjadi tidak sabar, karena tanggapan penguasa dan pemerintah dipandang tidak memadai.<sup>6</sup>

Keberhasilan gerakan mahasiswa dalam menuntut reformasi, menyebabkan mundurnya Soeharto dari kursi kepresidenan yang mengakhiri kekuasaan rezim Orde Baru yang telah berkuasa selama 32 tahun, penguasa yang selama memerintah telah membuat kesengsaraan rakyat dengan jalan menciptakan konspirasi ketakutan dan massa mengambang dalam sistem politiknya. Kesengsaraan rakyat timbul karena tindakan korupsi, kolusi, nepotisme yang dilakukan Soeharto bersama orang-orangnya, yang berakibat terjadinya krisis ekonomi yang berdampak pada rakyat.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Pieter Sanga Lewar, *op.cit*

<sup>5</sup> Al-Chaidar, *Reformasi Prematur Jawaban Islam Terhadap Reformasi Total, et.al*, Kata Pengantar, Darul Falah, Jakarta, 1998

<sup>6</sup> Arbi Sanit, *Reformasi Politik, Pustaka Pelajar*, Yogyakarta, 1998, hal. 42

<sup>7</sup> Al-Chaidar, *Op.cit*, hal.3

Telah diketahui secara luas, selama periode pemerintahan di bawah BJ. Habibie, ide reformasi mengambil bentuk tampilan yang beraneka ragam. Sebagai gagasan Demokrasi Politik maka usulan untuk pendirian partai, pemilu sistem distrik mulai muncul, pada lapangan ekonomi dorongan kuat untuk menghapus KKN, menghapus monopoli. Juga tak kalah gencarnya adalah perburuan harta kekayaan bekas presiden beserta keluarga. Dilihat dari segi gagasan, tampak bahwa reformasi mengandung arti pembersihan total kekuasaan lama dan tegaknya kekuasaan baru. Tentu sebagai gagasan itu sangatlah menarik, secara serampang acapkali yang muncul kepermukaan adalah desakan meminta turun kaum pejabat yang dianggap terlibat KKN, pembebasan tapol dan napol lalu ramai-ramai mendirikan partai.<sup>8</sup> Kecenderungan orang untuk mendirikan partai baru memang menjadi wacana politik menyusul tekat semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, termasuk didalamnya legeslatif, kalangan kampus untuk mengadakan reformasi politik secara mendasar. Semangat reformasi politik adalah demokratisasi, maka kebebasan untuk berbicara, berpendapat, dan berserikat menjadi pertahanan utama. Pemerintah harus segera merespon misalnya dengan pembebasan tahanan politik, menghidupkan pers yang SIUPP-nya telah dicabut, perubahan UU Pemilu dan sistem kepartaian dan sebagainya.<sup>9</sup>

Reformasi pada dasarnya ditujukan untuk memperbaharui atau memproduksi legitimasi baru bagi sistem atau kekuatan yang ada.<sup>10</sup> Reformasi

---

<sup>8</sup> Ari Sanit, *Op.cit*

<sup>9</sup> Al-Chaidar, *Op.cit*, hal. 262

<sup>10</sup> Siswo Yudohusodo, "Mewujudkan Pemerintahan Bersih Beriwibawah, *Kedaulatan Rakyat*, 30 Juni 1998

secara menyeluruh, diartikan sebagai perubahan segenap substansi sistem atau kehidupan politik, baik berupa aspek maupun unsur-unsurnya yang berarti bahwa reformasi politik menyangkut aspek kultur, struktur, proses dan produksi dari kehidupan politik Indonesia yang sedang diberlakukan dewasa ini. Berarti pula, bahwa ideologi, konstitusi, penguasa, eksekutif, legislatif, yudikatif, birokrasi, orpol, ormas, masyarakat sipil, pemilu, pola interaksi kekuasaan sampai kepada berbagai kebijaksanaan publik sebagai unsur kehidupan politik juga memerlukan pembaharuan.<sup>11</sup>

Dari latar belakang yang telah diuraikan di muka, maka membuat penulis merasa tertarik untuk mempelajari dan meneliti DAMPAK REFORMASI TERHADAP SISTEM POLITIK INDONESIA.

## **B. PERUMUSAN MASALAH**

Dari uraian yang telah disampaikan dalam latar belakang masalah diatas, kemudian penulis tertarik untuk merumuskan masalah sebagai berikut: Bagaimana dampak reformasi terhadap sistem politik Indonesia?

## **C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

### **a. Tujuan Penelitian**

- Untuk mengetahui dampak perubahan yang ditimbulkan adanya gerakan reformasi terhadap sistem politik Indonesia.
- Untuk mengetahui dampak positif maupun dampak negatif dari adanya gerakan reformasi yang terjadi.

---

<sup>11</sup> Arbi Sanit, *Op.cit.* hal. 105

#### b. Manfaat Penelitian

- Dari sisi keilmuan diharapkan dapat memperkaya literatur yang mengkaji tentang politik.
- Secara praktis diharapkan dapat memberikan masukan (kontribusi) terhadap pemerintah.

### D. KERANGKA DASAR TEORI

Kerangka dasar teori dimaksudkan adalah teori-teori yang digunakan di dalam melaksanakan penelitian sehingga kegiatan ini menjadi jelas, sistematis dan ilmiah.

- Menurut Masri Singarimbun : Teori adalah serangkaian asumsi, konsep, definisi dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep.<sup>12</sup>

Menurut definisi ini teori mengandung tiga hal. Pertama, teori adalah serangkaian proposisi antara konsep-konsep yang saling berhubungan. Kedua teori menerangkan secara sistematis suatu fenomena sosial dengan cara menentukan hubungan antar konsep. Ketiga, teori menerangkan fenomena tertentu dengan cara menentukan konsep mana yang berhubungan dengan konsep lainnya sebagaimana bentuk hubungannya. Sedangkan menurut Koentjaraningrat : Teori adalah merupakan pernyataan mengenai sebab atau mengenai adanya suatu hubungan positif antara gejala-gejala yang diteliti dan satu atau beberapa faktor tertentu dalam masyarakat.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Masri Singarimbun dan Sofia Effendi, *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta, 1989, hal. 37

<sup>13</sup> Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, PT. Gramedia, Jakarta, 1991, hal. 19

Dengan demikian pada dasarnya teori itu merupakan sarana pokok menyatukan hubungan sistematis antara fenomena sosial maupun alami yang hendak diteliti. Sedangkan teori-teori yang digunakan sebagai kerangka dasar atau pijakan dalam penelitian ini adalah :

### 1. Sistem

Sistem adalah suatu kesatuan yang didalamnya melibatkan, elemen-elemen, bagian-bagian yang terikat dalam suatu unit yang satu sama yang lain berbeda dalam keadaan kait mengkait dan fungsional.

Diantara berbagai elemen ataupun bagian tersebut harus mempunyai sifat keterikatan dan kohesivitas sehingga bentuk totalitas unit tersebut terjaga. Dengan kata lain, sebagai unit kesatuan maka setiap unsur, ataupun bagian haruslah bekerja sebagaimana mestinya. Sebagai satu kesatuan maka jika satu unsur saja tidak berfungsi, sistem tersebut mengalami kesulitan untuk bisa bekerja sesuai dengan fungsinya. Untuk ini Gabriel A. Almond dan G. Bingham Powell, Jr. telah menegaskan bahwa :<sup>14</sup>

“A system implies the interdependence of parts, and a boundary between it and its environments. By interdependence we mean the when the characteristic of one part in a system change, all the other parts and the system as a whole are affected”.

Sedangkan menurut A.S. Honby dan kawan-kawan dalam *The advented leaners Dictionary of current English*, sistem didefinisikan :

“A group of parts of object, often consisting of a principle part and number of less important part, working together according to a purpose”.

---

<sup>14</sup> Cheppy Haricahyono, *Ilmu Politik dan Perseptifnya*, Tiara Wacana Yogyakarta, 1991, hal. 92

Dengan demikian jelas bahwa sistem adalah sesuatu yang berhubungan satu sama lain sehingga membentuk satu kesatuan. Demikian pula, dalam satu sistem paling tidak menunjukkan adanya tiga kondisi, yaitu adanya faktor-faktor yang dihubungkan, adanya hubungan yang tidak terpisah diantara faktor-faktor tersebut sehingga membentuk kesatuan.

Suatu sistem adalah bagian-bagian yang saling tergantung, yang merupakan pula suatu kesatuan dengan lingkungannya. Dengan ketergantungan dimaksudkan bahwa apabila sifat-sifat suatu bagian dalam sistem berubah maka semua bagian dan sistem secara keseluruhanpun berubah pula. Dengan kata lain apabila suatu bagian atau variabel dalam sistem berubah baik kuantitas maupun kualitasnya, maka bagian-bagian lain kena pengaruhnya sehingga berubah.<sup>15</sup>

Aspek lain daripada konsepsi sistem adalah pengertian cakupan (*boundary*). Suatu sistem dimulai disuatu tempat dan berakhir disuatu tempat pula. Persoalan cakupan (*boundary*) ini mempunyai arti khusus sebab teori sistem biasanya membagi proses interaksi itu ke dalam tiga tahap yaitu input, conversion, dan output. Input dan output ini yang melibatkan sistem politik dengan lingkungannya. Proses konversi (perubahan) dari input ke output adalah kejadian yang sifatnya intern dalam sistem politik.<sup>16</sup>

David Easton, ahli Ilmu Politik Amerika Serikat, mengemukakan bahwa ke dalam input itu ada dua hal, yaitu :<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Drs. Sukarna, *Perbandingan Sistem Politik*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1990, hal. 1

<sup>16</sup> Drs. Sukarna, *Ibid*, hal.2

<sup>17</sup> Drs. Sukarna, *Ibid*, hal.3



1. Tuntutan (demand)
2. Dukungan (Support)

Ke dalam tuntutan termasuk empat hal seperti di bawah ini :

- a. Tuntutan untuk memperoleh jasa-jasa dan pelayanan, seperti undang-undang jam kerja, upah, dan kesempatan pendidikan.
- b. Tuntutan untuk pengaturan tingkah laku, seperti perlindungan untuk keselamatan umum, pengawasan pasar, aturan untuk memelihara / melindungi perkawinan, kesehatan.
- c. Tuntutan untuk ikut serta dalam sistem politik sebagai hak untuk memilih dan hak untuk menjabat suatu jabatan.
- d. Tuntutan untuk berkomunikasi dan saling menyampaikan informasi.

Sedangkan yang termasuk support adalah :

- a. Dukungan materiil : pembayaran pajak, pelayanan, seperti bekerja untuk umum dan dinas militer.
- b. Mentaati hukum dan peraturan.
- c. Dukungan partisipasi (ambil bagian/ikut serta), seperti memberikan suara, diskusi, dan bentuk-bentuk lain kegiatan politik.
- d. Perhatian yang ditujukan terhadap pengumuman-pengumuman pemerintah sebagai bukti penghargaan terhadap kewenangan / authoritinya.

## 2. Sistem Politik

Istilah sistem politik, pertama kali dikemukakan oleh David Easton dalam buku David Easton, *An American Political Scientist Was the First to Analyze Politics in Explicit, or Clearly Stated System Terms*.<sup>18</sup>

Seorang sarjana barat yang menawarkan suatu batasan bagi sistem politik terdiri dari tiga komponen, yaitu: 1) *The Political System Allocates Values* (by means of politics), 2) its allocations are authoritative, and 3) its authoritative allocations are binding on the society as whole. Pengertian atau batasan yang dikemukakan oleh David Easton diatas menyatakan bahwa sistem politik adalah merupakan alokasi daripada nilai-nilai, dalam mana pengalokasian dari pada nilai-nilai tadi bersifat paksaan atau dengan kewenangan, dan pengalokasian yang bersifat paksaan tadi mengikat masyarakat sebagai suatu keseluruhan.

Sedangkan menurut pendapat Robert A. Dahl dalam bukunya yang berjudul *Modern Political Analysis*, dinyatakan pengertian sistem politik adalah:

“a political system as any persistent pattern of human relationships that involves, to a significant extent, control, influence, power or authority”

Jadi menurut Dahl, sesuai dengan pendapat yang dikemukakannya sistem politik adalah sebagai pola yang tetap dari hubungan-hubungan antara manusia yang melibatkan, sampai dengan tingkat yang berarti, kontrol pengaruh kekuasaan, ataupun wewenang.<sup>19</sup>

<sup>18</sup> Cheppy Haricahyono, *Op.cit*, hal. 90

<sup>19</sup> Drs. Haryanto, *Sistem Politik : Suatu Pengantar*, Liberty Yogyakarta., 1982, hal. 1-2

Pengertian lain tentang sistem politik dinyatakan pula oleh Gabriel

A. Almond, yang menyatakan bahwa :

“..... the political system is that system of interactions to be found in all independent societies which performs the functions of integration and adaptation (both internally and vis-a-vis other societies) by means of the employment or threat of employment, of more or less legitimate physical compulsion”.

Pendapat yang dikemukakan oleh Almond ini menyatakan bahwa sistem politik adalah merupakan sistem interaksi yang terjadi di dalam masyarakat yang merdeka. Lebih lanjut dinyatakan pula oleh Almond bahwa sistem politik itu menjalankan fungsi integrasi dan adaptasi. Fungsi integrasi yang dijalankan oleh sistem politik adalah untuk mencapai kesatuan dan persatuan dalam masyarakat yang bersangkutan. Sedangkan fungsi adaptasi adalah merupakan fungsi penyesuaian terhadap lingkungan, baik terhadap lingkungan masyarakat yang lainnya.<sup>20</sup>

Adapun ciri-ciri atau karakter sistem politik menurut Gabriel A Almond di dalam bukunya yang berjudul *The Politics of the Developing Areas*, menyebutkan ada empat macam yaitu :<sup>21</sup>

1. Semua sistem politik pasti mempunyai struktur politik dengan suatu pengertian bahwa di dalam masyarakat yang paling sederhana pun, sistem politik dari masyarakat tersebut mempunyai tipe struktur politik yang terdapat di dalam masyarakat yang paling kompleks.
2. Semua sistem politik, baik yang sudah modern maupun yang masih primitif menjalankan fungsi yang sama walaupun frekuensinya berbeda-beda yang disebabkan oleh karena perbedaan struktur.

<sup>20</sup> Drs. Haryanto, *Ibid*, hal. 3

<sup>21</sup> Drs. Haryanto, *ibid*, hal. 6

3. Semua struktur politik, baik yang terdapat di dalam masyarakat yang sudah modern maupun yang terdapat di dalam masyarakat yang masih primitif, betapapun terspesialisasikan tetap mempunyai sifat multi fungsional (menjalankan beberapa/banyak fungsi).
4. Semua sistem politik adalah merupakan sistem "campuran" apabila dipandang dari pengertian kebudayaan. Dalam pengertian yang rasional tidak ada struktur dan kebudayaan yang semuanya modern, dan dalam pengertian yang tradisional tidak semuanya primitif. Perbedaan yang terdapat hanya bersifat relatif saja, dan keduanya (hal-hal yang bersifat modern dan tradisional) tercampur satu dengan yang lainnya.

Sedangkan menurut David Easton ciri-ciri utama dari sistem politik adalah sebagai berikut :<sup>22</sup>

#### 1. Ciri-ciri Identifikasi

Guna membedakan suatu sistem politik dengan sistem-sistem sosial lainnya, kita harus dapat mengidentifikasikan atau mengenali sistem politik dengan mendeskripsikan unit-unit yang fundamental dan menetapkan batas-batas yang memisahkannya dari unit-unit yang berada di luar sistem politik.

##### a. Unit-unit suatu sistem politik

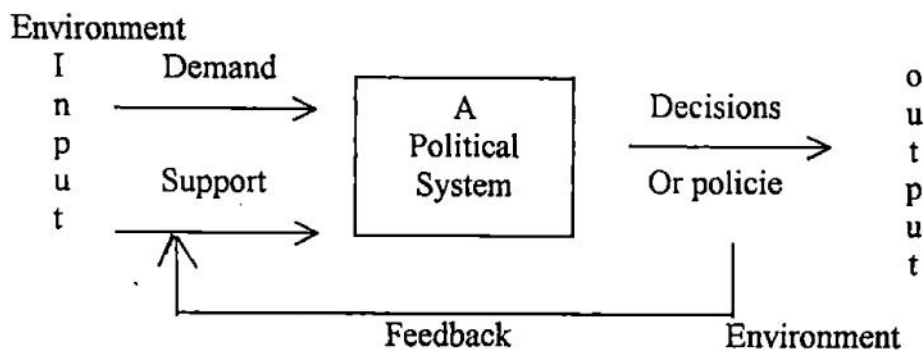
Unit-unit ini adalah merupakan elemen-elemen atau unsur-unsur yang kita nyatakan membentuk suatu sistem. Dalam sistem politik, unit-unit berujud tindakan-tindakan politik.

---

<sup>22</sup> Drs. Haryanto, *Ibid*, hal. 7-10

### b. Batas-batas

Batas suatu sistem politik dapat dinyatakan dengan semua tindakan atau aktivitas yang sedikit banyak berhubungan secara langsung dengan pembuatan keputusan-keputusan yang mengikat masyarakat, setiap tindakan atau aktivitas sosial yang tidak mengandung ciri-ciri tersebut akan dikeluarkan dari sistem politik dan dengan demikian secara otomatis akan dipandang sebagai variabel eksternal dalam lingkungan.



### 2. Input dan Output

Sistem politik secara kontinyu harus mendapatkan input untuk bekerja. Tanpa adanya input sistem tidak dapat mengidentifikasi pekerjaan yang dilakukan oleh sistem itu.

### 3. Diferensiasi dalam suatu sistem

Kita ketahui bahwa dari lingkungan akan memberikan energi atau tenaga untuk mengaktifkan suatu sistem, dan informasi yang akan dijadikan bahan pertimbangan untuk pembangunan energi atau tenaga tersebut. Dengan cara yang seperti ini suatu sistem dapat bekerja. Pada gilirannya

sistem politik akan menghasilkan suatu output yang berbeda dengan input yang masuk atau diperoleh dari lingkungannya.

#### 4. Integrasi suatu sistem

Fakta diferensiasi ini membukakan suatu wilayah yang luas bagi peneliti sistem-sistem politik. Diferensiasi struktural ini mengatur kekuatan-kekuatan yang secara potensial dapat merusak integritas sistem politik.

### 3. Bentuk-bentuk Reformasi

Reformasi merupakan tahapan politik yang mengedepankan semangat pembaharuan dan perbaikan kebijaksanaan dan tindakan politik yang tidak akomodatif lagi bagi pengelolaan kehidupan bernegara secara demokratis. Dinamika aspirasi politik rakyat, yang nota bene sebagai pemilik kedaulatan tertinggi menuntut reformasi politik. Dan mereka mengartikan bahwa reformasi merupakan suatu perubahan yang radikal dalam kehidupan sosial politik bangsa Indonesia.

Perubahan yang radikal itu dapat dilihat pertama, dari keberhasilan gerakan reformasi dalam menurunkan Soeharto dari kursi presiden pada tanggal 21 Mei 1998 setelah berkuasa selama 32 tahun. Kedua, sejak reformasi terjadi ledakan partisipasi politik rakyat sangat luar biasa hingga sampai batas tertentu memunculkan gejala anarkisme politik.<sup>23</sup>

Sebagai konsepsi tentang perubahan kehidupan, reformasi tentunya dibedakan dengan evolusi dan revolusi. Evolusi berproses dalam bentuk

---

<sup>23</sup> Header Nashir, "Reformasi di Persimpangan Jalan", *Republika*, 12 Februari 1999

pertumbuhan (*progress*) atau perubahan nilai, prinsip hidup, dan teknik kehidupan sosial yang merupakan bagian dari kesinambungan sejarah. Dan evolusi ditandai oleh pertumbuhan segenap aspek kehidupan masyarakat. Sedangkan perubahan yang mencampakkan orde sosial yang sedang berlaku dan struktur kekuasaan yang ada, serta perubahan secara mendasar (*fundamental*) dengan jalan menghancurkan segala kekuatan penghalangnya disebut revolusi. Untuk dapat dikatakan gerakan revolusioner, suatu aksi masyarakat hendaklah menghadap Orde Sosial yang berlaku pada bahaya substansial, tidak mencukupi untuk disebut revolusi. Untuk dapat dikatakan gerakan revolusioner, suatu aksi masyarakat hendaklah menghadapkan orde sosial yang berlaku pada bahaya substansial, tidak mencukupi untuk disebut sebagai suatu revolusi sekalipun telah melakukan berbagai bentuk kekerasan, mulai dari huru-hara sampai pemberontakan bersenjata, bila tidak mengancam tatanan kehidupan yang berlaku.<sup>24</sup>

Berbeda dengan evolusi dan revolusi, reformasi merupakan perubahan kehidupan masyarakat jalan tengah. Mendekati evolusi, reformasi dimaknai sebagai perubahan sosial yang diprakarsai dan dilaksanakan oleh semua pihak, berkenaan dengan perubahan seluruh aspek kehidupan, berlangsung secara perlahan atau dalam jangka panjang, dan proses secara alami dalam artian didasarkan kepada suatu rencana yang dipercepat. Sebaliknya untuk mendekati revolusi, reformasi degerakkan dan diprakarsai oleh masyarakat untuk melakukan perubahan segenap aspek

---

<sup>24</sup> Arbi Sanit, *Op.cit.*, hal. 99-100

kehidupan secara mendasar, berlangsung secara cepat sehingga tidak menghiraukan jumlah dan kualitas korban, apalagi mengingat prosesnya yang kental diwarnai oleh kekerasan.<sup>25</sup>

Keinginan penguasa dan pemerintah untuk melaksanakan reformasi politik dalam kecenderungannya kepada evolusi, berbeda dengan tuntutan reformasi politik masyarakat yang dikumandangkan oleh gerakan politik mahasiswa'98 punya kecenderungan revolusi, maka sesungguhnya tuntutan reformasi politik mahasiswa mengakui peran pemerintah dan penguasa sebagai pelaksana reformasi politik. Justru untuk itu diperlukan restrukturisasi lembaga negara terlebih dahulu. Sehingga penguasa dan pemerintah mampu mereformasi kerangka operasional kehidupan politik berdasarkan reinterpretasi ideologi dan konstitusi, restrukturisasi dan refungsionisasi lembaga-lembaga politik, dan penghapusan semua peraturan perundangan anti-demokratisasi. Sekalipun reformasi politik versi masyarakat dan mahasiswa itu menghendaki pelaksanaannya yang cepat atas dukungan kekuatan *people power*.<sup>26</sup>

Gerakan reformasi tanpa kekerasan adalah mustahil, hanya retorika politik menyetakan bahwa gerakan reformasi akan berhasil tanpa kekerasan (penyerangan, kerusuhan, penganiayaan, dan aksi-aksi lain). Berbagai bukti menunjukkan bahwa setiap bentuk gerakan reformasi selalu berkaitan dengan aksi kekerasan, seperti yang terjadi di Indonesia telah menjadikan bentrok dan kekerasan antara aparat dan mahasiswa, sehingga menimbulkan

---

<sup>25</sup> Arbi Sanit, *Ibid*, hal. 101

<sup>26</sup> *Ibid*



korban seperti peristiwa penembakan enam mahasiswa Universitas Trisakti Jakarta tanggal 12 Mei 1998. Perlawanan mahasiswa yang semakin membara sehingga timbul letupan pembakaran, penjarahan dan kerusakan yang dilakukan sebagian rakyat yang tidak bertanggung jawab.

Bentuk-bentuk kekerasan yang menimpa masyarakat kelas rawan antara lain : 1) para penguasa acapkali menjadikan masyarakat kelas bawah adalah masyarakat yang selalu pasrah, sehingga mudah dieksploitas dalam menghadapi berbagai bentuk kebijakan politik dan ekonomi. 2) pola pembangunan tidak berorientasi pada kesejahteraan rakyat menimbulkan kesenjangan dan kecemburuan sosial begitu tinggi. 3) pemerintah tidak menunjang terbentuknya masyarakat kelas menengah otonom yang bisa dijabatani antara elit (politik dan ekonomi) dan kelas bawah. 4) birokrasi pemerintah tidak berorientasi kepada kepentingan pelayanan (*public service*). 5) pemerintah tidak mengatasi konflik sosial yang laten, hanya mengatasi konflik yang muncul (*manifest conflict*). 6) anggota-anggota di lembaga perwakilan rakyat tidak mencerminkan keterwakilan secara riil.<sup>27</sup>

#### 4. Reformasi Politik

Pemicu maraknya tuntutan reformasi politik sejak pertengahan 1997 ialah krisis moneter dan ekonomi, yang secara cepat melebar menjadi krisis politik dalam bentuk menipisnya kepercayaan kepada rupiah, sistem ekonomi dan sistem politik. Para pendukung reformasi politik telah

---

<sup>27</sup> Erlangga Masdiana, *Op.cit*

diyakini, bahwa segala bentuk krisis yang dialami masyarakat bangsa-bangsa-negara Indonesia dewasa ini mempunyai akar yang mendalam kepada sistem-sistem kehidupan yang telah ditata dan beroperasi selama tiga dekade terakhir. Bila kita lihat dengan jujur kehidupan bangsa, bernegara dan bermasyarakat dewasa ini, kita sedang menghadapi krisis nasional yang bersifat multidimensional.

Ketimpangan sosial antara kelompok kaya dengan kelompok miskin menganga sangat lebar, akhlak atau moral sebagian pemimpin dan masyarakat cenderung morat-marit pada gilirannya menimbulkan fenomena muntaber (munafik tapi berhasil, seperti diistilahkan Pak Mashoeri), kepercayaan masyarakat pada pemerintah semakin tipis, uang rupiah semakin remuk dan PHK serta pengangguran yang semakin lepas kendali, dan makin tumpulnya rasa kemanusiaan yang menghinggapi sebagian para penyelenggara negara dan juga sebagian para penyelenggara negara dan juga sebagian anggota masyarakat.

Perjalanan Orde Baru selama 32 tahun kita akui telah menampilkan keberhasilan pembangunan dalam berbagai hal, namun menghadirkan penyakit-prnyakit sosial dan ekonomi yang kelewat berat, seperti korupsi, kolusi, nepotisme keserakahan, dan Jegerasi moral yang hampir menyeluruh di segenap sektor kehidupan. Mengapa setelah 32 tahun berjalan Orde Baru, kini tiba-tiba terkuak dengan nyata berbagai borok atau *loopholes* yang demikian gawat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita ?

Tampaknya ada dua sebab utama yang perlu dicermati : pertama, sistem sosial, politik, dan ekonomi yang kita bangun ternyata tidak lagi tenable dan sustainable karena tidak menjamin adanya akuntabilitas dan kreativitas, dan kedua, struktur mental yang korup predatorik ternyata tumbuh semakin parah dari waktu ke waktu selama kurun waktu 32 tahun terakhir ini.<sup>28</sup>

Reformasi politik itu haru berlangsung secara damai, gradual, evolutif dan konstitusional. Tuntutan reformasi seperti ini harusnya, jika pemerintah cerdas, segera direspon dan diakomodasikan, bukan saja karena ia mencerminkan aspirasi mayoritas kelompok masyarakat, melainkan lebih penting lagi adalah menutup peluang keinginan kelompok-kelompok tertentu untuk melakukan reformasi secara radikal revolusioner, kekerasan, dan inkonstitusional. Meskipun tidak jelas terlihat, namun secara indikatif ada gejala yang menunjukkan kemungkinan tersebut, dan justru tuntutan cara terakhir inilah yang mulai menggejala di tengah-tengah masyarakat, yang ditandai oleh kecenderungan radikalisasi massa.

Dalam perspektif demikian, munculnya cendekiawan-cendekiawan kritis seperti Amien Rais, Abdurrahman Wahid, Nurcholis Madjid akan sangat membantu memberikan tawaran solusi atas berbagai persoalan sosial-ekonomi-politik yang memang sangat kompleks. Pemikiran pemikiran kritis para cendekiawan itu bisa membuka perspektif baru dan mampu memberikan semacam pencerahan (*enlightening*) dalam kehidupan

---

<sup>28</sup> Amien Rais, "Pilihan dalam Mengatasi Krisis : Status Quo atau Reformasi", et.al, *Indonesia Disimpang Jalan*, Mizan Bandung, 1998, hal. 17-18.

politik nasional. Tokoh-tokoh tersebut berfungsi untuk membuka jalan dan menjadi semacam “personifikasi dalam proses pembukaan (*opening up*) sebagai persiapan menghadapi akhir terowongan paternalisme.”<sup>29</sup>

Figur cendekiawan seperti Amien Rais yang secara individual memiliki *political leverage* cukup tinggi mampu menggerakkan terjadinya radikalisme massa. Disamping itu, gerakan massa yang bisa menjelma menjadi *people power* bisa memicu radikalisme dan tindakan-tindakan revolusioner, sangat tergantung pada daya adaptasi dan kemampuan akomodasi sistem kekuasaan yang berlaku sekarang. Semakin rendah adaptasi dan kemampuan akomodasi sebuah sistem kekuasaan, maka semakin tinggi dorongan untuk memunculkan gerakan radikalisme massa. Sebab, radikalisme massa sesungguhnya melambangkan sebuah sikap perlawanan dari massa- rakyat kepada kekuasaan yang represif dan tidak akomodatif.<sup>30</sup>

Gejala ketidakmampuan dan rentanya sistem kekuasaan itu berakar kepada sistem politik (kekuasaan) yang lemah dan kebijaksanaan pembangunan yang tidak efektif. Lemahnya pemerintah justru bersumber dari basis kekuatannya yang sempit dan artifisial. Dan lemahnya kebijaksanaan pembangunan dibuktikan oleh ketidakmampuan pertumbuhan ekonomi, mendorong proses demokratisasi politik dan aspek kehidupan lainnya. Pertumbuhan ekonomi yang cepat dan tinggi malah menggerogoti demokrasi, karena kehidupan politik tidak dikembangkan setara dengan

---

<sup>29</sup> Al-Chaidar, *Op.cit.*, hal. 239

<sup>30</sup> Al-Chaidar, *Ibid*, hal.240

kemajuan ekonomi, sehingga kemampuan mengontrol dan mengarahkan proses ekonomi menjadi mandul.<sup>31</sup>

Pemusatan kekuasaan di kritik secara frontal berhadapan dengan demokratisasi yang justru dipandang sebagai misi Orde Baru untuk mengoreksi total Orde Lama. Kebijakan stabilitas yang kaku di kritik sebab, menghalangi perubahan alami, sehingga dinamika kehidupan sosial ekonomi masyarakat tidak mengimbangi terhadap kehidupan politik. Dalam situasi seperti itu, masyarakat yang serasa sudah punya peluang mendirikan sikap, lalu beralih dari mendukung atas dasar mobilisasi menjadi membangkang dan menuntut reformasi.<sup>32</sup>

Reformasi politik yang harus dilakukan di Indonesia haruslah menyentuh tiga hal esensial dalam demokrasi. Robert A. Dahl merumuskan tiga hal itu sebagai : kompetisi politik (*Politics of Constestation*), partisipasi politik (*political participation*), dan perlindungan hak-hak berpolitik (*civil liberties*). Tiga hal ini berada dalam satu paket yang saling mensyaratkan satu sama lain. Tidak ada kompetisi politik tanpa partisipasi politik dan perlindungan hak-hak politik dan sebaliknya.<sup>33</sup>

Dan persoalan reformasi politik yang menjadi tuntutan merupakan suatu keharusan. Pemerintah Indonesia harus bersungguh-sungguh melaksanakan reformasi, karena reformasi yang kita kehendaki harus dalam kerangka sistem nasional yaitu dengan tetap mempertahankan persatuan bangsa berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

---

<sup>31</sup> Arbi Sanit, *Op.cit.*, hal. 44

<sup>32</sup> Arbi Sanit, *Ibid*, hal. 44

<sup>33</sup> Al-Chaidar, *Op.cit.*, hal. 240

## **E. DEFINISI KONSEPSIONAL**

Yang dimaksud definisi konseptual adalah suatu usaha untuk menjelaskan mengenai pembatasan pengertian antar konsep yang satu dengan yang lainnya, agar tidak terjadi kesalahan pemahaman.

Adapun definisi yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Dampak adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat baik negatif maupun positif.
2. Sistem adalah suatu kesatuan dimana didalamnya terdapat unsur-unsur atau elemen-elemen yang terkait dalam suatu unit yang satu sama lain berbeda dalam keadaan kait mengkait dan fungsional.
3. Politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (atau negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu.
4. Sistem politik adalah merupakan sistem interaksi atau hubungan yang terjadi di dalam masyarakat, dan pengalokasian nilai-nilai itu dengan menggunakan paksaan fisik yang sedikit banyak bersifat sah.
5. Reformasi adalah perubahan untuk memperbaiki masalah-masalah sosial, politik atau agama yang terjadi dalam suatu masyarakat atau negara.
6. Reformasi politik adalah merupakan tahapan politik yang mengedepankan semangat pembaharuan dan perbaikan kebijaksanaan dan tindakan yang tidak akomodatif lagi bagi pengelolaan kehidupan bernegara secara demokratis.

## F. DEFINISI OPERASIONAL

Yang dimaksud definisi operasional adalah unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana caranya mengukur suatu variabel. Dengan kata lain definisi operasional adalah semacam petunjuk pelaksanaan bagaimana caranya mengukur suatu variabel.<sup>34</sup>

Dengan demikian agar suatu penelitian dapat diukur variabelnya maka perlu dioperasionalkan terlebih dahulu.

Sedangkan untuk mengukur variabel dalam penelitian ini menggunakan indikator-indikator sebagai berikut :

### A. DAMPAK REFORMASI POLITIK

1. Munculnya partai-parti politik baru
2. Pemerintahan sementara untuk pemilu
3. Kebebasan pers
4. Pembebasan Tapol dan Napol
5. Tuntutan Untuk Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa

### B. DAMPAK POSITIF REFORMASI POLITIK

1. Munculnya partai-partai politik baru bisa menimbulkan konflik
2. Tuntutan Pelaksanaan Pemilu yang Aman dan Damai
3. Multiplikasi Media Massa
4. Tumbuhnya perhatian terhadap hak asasi manusia
5. Tuntutan pemberantasan KKN

---

<sup>34</sup> Masri Singarimbun dan Sofjan Effendi, *Op.cit.*, hal. 46

### C. DAMPAK NEGATIF REFORMASI

1. Terbatasnya massa pendukung partai
2. Lambannya perhitungan suara
3. Kebebasan pers yang tidak bertanggung jawab
4. Masalah HAM yang belum dapat diselesaikan

### G. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu cara yang utama dalam melakukan penelitian. Metode penelitian memandu peneliti tentang urutan-urutan bagaimana penelitian dilakukan.

#### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif analisis. Adapun Penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.<sup>35</sup>

#### 2. Data yang dibutuhkan

##### Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku, mass media, makalah, dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian yang penulis lakukan.

---

<sup>35</sup> Moh. Nazir, Ph.D. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1989. Hal. 63



### 3. Teknik pengumpulan data

Dalam suatu penelitian ilmu sosial masalah pengumpulan data kadang-kadang bukan merupakan hal yang mudah. Oleh karena itu seorang peneliti sebelum terjun ke lapangan untuk mengadakan penelitian terlebih dahulu harus dapat menentukan teknik-teknik pengumpulan datanya yang akan digunakan dalam penelitian nantinya. Sesuai dengan metode penelitian maka untuk memperoleh data-data penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan (*library research*) yaitu dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mengajarkan teori-teori, serta peraturan-peraturan dan informasi lain yang diperoleh dari buku-buku literatur lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

### 4. Teknik analisa data

Sesuai dengan jenis penelitian yaitu jenis penelitian deskriptif analisis, maka teknik analisa data yang digunakan teknik *content analysis* atau analisis isi. Ada beberapa definisi tentang *content analysis* atau analisis isi. Menurut definisi Berelson analisis isi adalah dengan teknik penelitian untuk keperluan mendeskripsikan secara objektif, sistematis dan kuantitatif tentang manifestasi komunikasi. Sedangkan menurut Weber, Analisis isi adalah metodologi penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang sah dari sebuah buku atau dokumen kemudian menurut Krippendorff, analisis isi adalah teknik penelitian yang dimanfaatkan untuk menarik kesimpulan yang replikatif dan sah dari data atas dasar konteksnya.

Dan terakhir dikemukakan oleh Holsti memberikan definisi yang agak lain. Analisis adalah teknik apapun yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan dan dilakukan secara objektif dan sistematis. (Dr. Lexy J. Moleong, MA, 1994 : 163).

## **H. SISTEMATIKA PENULISAN**

### **BAB I. PENDAHULUAN**

Bab pendahuluan ini merupakan ringkasan singkat dari keseluruhan bab yang ada. Di dalamnya berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka dasar teori, definisi konseptual, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II. FAKTOR-FAKTOR YANG MENDORONG TERJADINYA GERAKAN REFORMASI DI INDONESIA (1998)**

Dalam bab dua ini akan dibahas faktor yang mendorong terjadinya gerakan reformasi di Indonesia (1998). Di dalamnya akan di bahas mengenai kondisi politik Orde Baru dan diceritakan pula tentang kondisi perekonomian Orde Baru.

### **BAB III. DAMPAK REFORMASI TERHADAP SISTEM POLITIK INDONESIA**

Dalam bab tiga langsung membahas tentang dampak reformasi terhadap sistem politik Indonesia. Didalamnya akan dibahas mengenai dampak dari adanya gerakan reformasi terhadap sistem politik Indonesia. Di sini juga akan dibahas tentang dampak positif dan dampak negatif reformasi politik yang ditimbulkan.

#### BAB IV. PENUTUP

Dalam bab terakhir ini, akan ditutup dengan memberikan kesimpulan dan saran dari penjelasan bab-bab sebelumnya.